



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BALAI BAHASA  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2020—2024**

**BALAI BAHASA PROVINSI SUNATERA SELATAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Balai Bahasa Sumatera Selatan Tahun 2020--2024. Renstra Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020—2024 ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan.

Renstra Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan ini memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, dan struktur program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2020—2024. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, karena itu yang digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan kebahasaan dan kesastraan di Sumatera Selatan terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan serta evaluasi hasil kinerjanya pada 2020—2024 ini mengacu pada Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024.

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan dan sasaran strategis Balai Bahasa Sumatera Selatan memerlukan proses, kerja keras, integritas, dan komitmen semua pihak untuk selalu bersinergi dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Balai Bahasa Sumatera Selatan ini.

Palembang, 4 Maret 2021  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Sumatera Selatan,



Drs. Umar Solikhan, M.Hum.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan 2020—merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024. Berdasarkan landasan historis, kultural, politis, dan hukum sebagaimana dimuat dalam Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan menetapkan garis haluan dan kebijakan penanganan bahasa dan sastra sesuai dengan garis haluan dan kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan menginduk pada visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu “Terwujudnya ekosistem pengembangan dan pembinaan bahasa yang mendukung budaya riset dan inovasi kebahasaan yang kreatif, budaya literasi masyarakat yang tinggi, penguatan praktik diplomasi kebahasaan yang maju, dan perlindungan bahasa dan sastra yang dinamis berdasarkan politik dan perencanaan bahasa baru di Provinsi Sumatera Selatan”. Untuk mencapai visi tersebut, berikut misi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Mewujudkan ekosistem pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra yang mendukung budaya riset dan inovasi kebahasaan yang kreatif.

1. Mewujudkan praktek-praktek pendidikan literasi di masyarakat untuk meningkatkan budaya literasi yang tinggi yang ditopang oleh teknologi digital.
2. Mewujudkan penguatan diplomasi kebahasaan yang maju.
3. Mewujudkan perlindungan bahasa dan sastra yang dinamis berbasis kekuatan masyarakat.
4. Mewujudkan layanan profesional kebahasaan.

Dalam mewujudkan visi dan misinya, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan strategis, sasaran strategis, dan arah kebijakan yang diwujudkan dalam program dan kegiatan selama kurun waktu 2020—2024. Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada garis haluan yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Terciptanya ekosistem riset dan rekayasa kebahasaan dasar dan terapan yang kondusif untuk menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat dijadikan rujukan dalam teori dan praktek kebahasaan.
2. Terciptanya budaya literasi masyarakat yang maju dengan kompetensi yang tinggi

sejalan dengan perkembangan teknologi digital.

- 3 Menguatnya kerja sama institutional dan profesional para pemangku kepentingan pengembangan dan pembinaan bahasa dalam konteks pemanfaatan kepakaran kebahasaan untuk menunjang pemberdayaan masyarakat.
- 4 Menguatnya peran bahasa Indonesia dalam praktik diplomasi kebahasaan di luar negeri.
- 5 Terpeliharanya praktik-praktik bahasa dan sastra daerah yang dinamis oleh komunitas penutur bahasa sebagai wujud perlindungan kearifan lokal.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.3 Paradigma Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan .....	5
a. Peningkatan budaya literasi;.....	5
<b>BAB II .....</b>	<b>15</b>
<b>VISI, MISI, DAN TUJUAN.....</b>	<b>15</b>
<b>BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN .....</b>	<b>15</b>
2.1. Visi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan .....	15
2.2. Misi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan.....	15
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan .....	15
2.5. Tata Nilai Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan .....	18
<b>BAB III.....</b>	<b>20</b>
<b>ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN.....</b>	<b>20</b>
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan.....	20
3.2 Kerangka Regulasi .....	20
3.3. Kerangka Kelembagaan .....	21
<b>BAB IV .....</b>	<b>23</b>
<b>TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>23</b>
4.1 Target Kinerja.....	23
4.2 Kerangka Pendanaan.....	24
4.3. Sistem Pemantauan dan Evaluasi .....	25
<b>BAB V .....</b>	<b>27</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>27</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

Sumatra Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatra. Provinsi ini beribu kota di Palembang. Provinsi Sumatra Selatan didirikan pada tanggal 12 September 1950 yang awalnya mencakup daerah Sumatra Selatan sekarang, Bengkulu, Lampung, dan kepulauan Bangka Belitung. Secara geografis, Sumatra Selatan berbatasan dengan provinsi Jambi di utara, provinsi Kepulauan Bangka-Belitung di timur, provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu di barat. Palembang, telah terkenal sejak dahulu karena menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Provinsi Sumatra Selatan secara geografis terletak antara 1–4° Lintang Selatan dan 102–106° Bujur Timur, dan luas daerah seluruhnya adalah 87.017.41 km<sup>2</sup>. Secara administratif Sumatra Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota.

Penduduk Sumatera Selatan selain penutur bahasa Indonesia, sebagian besar penduduk adalah suku Komerling, Jawa, Palembang, Gumai, Semendo, Lintang, dan Kayu Agung Lematang, Ogan, Pasemah, Sekayu, Rawas, dan Banyu Asin yang bertutur menggunakan bahasa Melayu, Jawa, Komerling, Lematang, Ogan, dan Pedamaran. Jumlah penutur bahasa daerah di Sumatera Selatan Dari hasil pemetaan pada 2007 ada ribuan penutur yang dapat dikategorikan sebagai bahasa resmi yang dipakai di Sumsel. Bahasa Melayu 56 ribu penutur, Bahasa Kayua gung 6.800 penutur, Bahasa Ogan 33 ribu penutur, Bahasa Lematang 34 ribu penutur, Bahasa Komerling 12 ribu penutur, Bahasa Pedamaran 6 ribu penutur, dan Bahasa Jawa 3.330 penutur dari jumlah penutur tersebut masih cukup banyak dan terlalu mengawatirkan. Dari kondisi tersebut perlu adanya upaya melestarikan keberadaan bahasa daerah di Sumatera Selatan karena dampak dari perkembangan zaman dimungkinkan pergeseran antar budaya dan mengancam keberadaan bahasa daerah.

Bidang Sastra provinsi Sumatera Selatan memiliki beberapa jenis sastra lisan dengan menggunakan bahasa daerah seperti Njang Panjang dan Bujang Jelihim di Ogan Komerling Ulu (OKU), Jelihiman di Ogan Ilir (OI), Senjang di Musi Banyuasin (MUBA), Geguritan, Tadut, Betadur, dan Tangis Ayam yang berkembang di Lahat, Nyanyian Panjang dan Bujang Jemaran di Ogan Komerling Ilir (OKI). Dilihat dari

perkembangan sastra lisan di provinsi Sumatera Selatan seiring berjalannya waktu belum banyak dikenal masyarakat secara umum hanya kalangan masyarakat dan komunitas tertentu yang mengetahui sehingga perlu penanganan dan perlindungan untuk melestarikan sastra lisan.

Melihat permasalahan tersebut di atas Balai Bahasa Sumatera Selatan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai program dan kegiatan yang mendorong pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 078 Tahun 2015, Balai Bahasa adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Oleh karena itu, renstra Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan 2020—2024 harus mengacu dan merupakan penjabaran visi dan misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang tertuang dalam Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024.

### 1.1. Kondisi Umum

Pencapaian Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Sumatera Selatan kurun waktu 2015—2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Kegiatan		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya Kosa Kata Bahasa Indonesia	1.	Jumlah Kosa Kata Indonesia	500 kosa kata	1000 kosa kata	1200 kosa kata	1000 kosa kata	500 kosa kata
2.	Meningkatnya Mutu dan Jumlah Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan.	1.	Jumlah Penelitian Bahasa dan Sastra	4 naskah	8 naskah	5 naskah	5 naskah	5 naskah

		2.	Jumlah Publikasi Ilmiah Bahasa dan Sastra	2 terbitan	2 terbitan	2 terbitan	2 terbitan	2 terbitan
4.	Meningkatnya Mutu dan Jumlah Bahan Ajar Pengayaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia	1.	Jumlah Bahan dan Modul Pembelajaran Bahasa dan Sastra	4 bahan	4 Bahan	12 bahan	4 bahan	4 bahan
6.	Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra	1.	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra	750 orang	1000 orang	1200 orang	800 orang	1400 orang
		2.	Jumlah Generasi Muda yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra	800 orang	1400 orang	700 orang	700 orang	500 orang
7.	Meningkatnya Jumlah Ruang Publik yang Terkendali	1.	Jumlah Badan Publik yang Terkendali Penggunaannya	17 lembaga	34 lembaga	34 lembaga	17 lembaga	10 lembaga
		2.	Jumlah Badan Swasta yang Terkendali Penggunaannya	5 lembaga	5 lembaga	10 lembaga	20 lembaga	10 lembaga



Selama periode tahun 2015—2019, Balai Bahasa Sumatera Selatan telah menyelesaikan sejumlah kegiatan, yakni melaksanakan penelitian kebahasaan berupa pengambilan data kosakata dengan capaian 4.200 kosakata. Penelitian kebahasaan dan kesastraan dengan menghasilkan 27 naskah. Publikasi ilmiah dengan capaian 10 terbitan dalam bentuk jurnal ilmiah. Bahan ajar bahasa dan sastra dengan capaian 26 bahan ajar. Jumlah tenaga profesional terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra dengan capaian 5.150 orang dengan kualitas meningkat setelah dilakukan pembinaan sebesar 95%. Capaian generasi muda terbina dalam penggunaan Bahasa dan sastra sebesar 4.100 dengan kualitas meningkat sebesar 90%. Capaian Badan publik terkendali sebesar 112 dengan tingkat dengan peningkatan mutu sebesar 75% dan yang diusulkan untuk penilaian tingkat nasional 3 lembaga tetapi belum memperoleh nominasi 10 besar. Capaian penggunaan bahasa Indonesia di Ruang Publik bagi lembaga swasta sebesar 50 lembaga jumlah peningkatan mutu sebesar 45%.

Dalam dokumen RPJMN 2015—2019, terdapat dua prioritas nasional (PN) yang berkaitan dengan pembangunan manusia, yaitu PN 3 (Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing) dan PN 4 (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan). Prioritas Nasional 3 dijabarkan dalam tujuh prioritas pembangunan (PP). Dua dari tujuh PP tersebut merupakan prioritas pembangunan bidang pendidikan, yaitu PP 4 (Pemerataan layanan pendidikan berkualitas) dan PP 7 (Peningkatan produktivitas dan daya saing). Sementara itu, prioritas nasional 4 tentang revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dijabarkan dalam empat program prioritas. Dua di antara empat PP tersebut merupakan prioritas pembangunan bidang kebudayaan dan kebahasaan, yaitu meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (PP 2) dan meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas (PP 4).

Pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan, merupakan bagian dari pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan. Fokus pembangunan dalam bidang ini diarahkan pada empat titik strategis, yaitu (1) perencanaan bahasa dan implementasinya, (2) pembangunan budaya literasi, (3) pemajuan sastra, dan (4) pengembangan sistem perbukuan. Empat titik strategis tersebut wajib dioptimalkan dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter.

Keempat titik strategis dalam pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan di atas perlu diejawantahkan dalam dokumen rencana strategis yang memuat arah kebijakan dan perangkat pendukung yang diperlukan, baik dukungan anggaran maupun regulasi. Dokumen tersebut harus memuat langkah konkret yang ditempuh selama kurun waktu tertentu sehingga

tujuan pembangunan tercapai melalui program yang tepat sasaran dan anggaran yang efisien. Untuk kepentingan itulah Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020—2024 ini disusun.

### 1.3 Paradigma Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

Arah kebijakan Kemendikbud dalam Renstra 2020–2024 menyangkut pembangunan kebahasaan adalah “Peningkatan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas” yang dicapai melalui strategi sebagai berikut.

a. Peningkatan budaya literasi;

2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; dan
3. penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

Atas dasar itu, arah kebijakan dan paradigma pembangunan kebahasaan dan kesastraan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tergambar dalam skema sebagai berikut.

#### SASARAN/TARGET 2020-2024 (5 TAHUN)

Terwujudnya ekosistem pengembangan dan pembinaan bahasa yang mendukung **budaya riset dan inovasi kebahasaan yang kreatif, budaya literasi masyarakat yang tinggi, penguatan praktek diplomasi kebahasaan yang maju, dan perlindungan bahasa dan sastra yang dinamis berdasarkan politik dan perencanaan bahasa baru.**



#### 01. Budaya Riset dan Inovasi Kebahasaan yang Kreatif

Bahasa mencakup simbol, makna, penggunaan, dan komunikasi. Simbol itu berupa bunyi yang diucapkan atau tanda yang dituliskan yang mengutamakan makna. Simbol-simbol bermakna itu digunakan dalam berbicara, menyimak, menulis, dan membaca bagi keperluan berkomunikasi. Perilaku berbahasa itu bukan merupakan kegiatan mekanis atau fisik. Bahasa mempunyai hubungan yang erat dengan berpikir, merasa, dan berimajinasi, yaitu kegiatan yang bertautan dengan makna, bukan dengan

benda-benda hampa yang sekadar menjadi stimulus yang selesai dalam wujudnya sendiri. Dengan menggunakan bahasa, seseorang membatasi makna sesuatu, terdokumentasikannya kosa kata sehingga terjadi susunan makna, yang sangat penting bagi kehidupan intelektual, dan dapat pula menggunakan maknamakna itu dalam konteks dan situasi yang baru. Cara berpikir seseorang tercermin dalam bahasa yang digunakannya. Jika cara berpikir seseorang itu teratur, bahasa yang digunakannya pun teratur pula.

Bahasa digunakan dalam komunikasi yang menimbulkan saling pengaruh antara para penutur melalui penyampaian dan penerimaan kehendak, perasaan, dan pikiran, serta menimbulkan hubungan sosial. Bahasa merupakan bagian dari budaya yang sekaligus mencerminkan keseluruhan budaya itu di dalam struktur bahasa, di dalam susunan makna dan kosa kata (*vocabulary*), serta di dalam penggunaan bahasa itu. Dalam berbahasa, masyarakat Indonesia secara umum masih menganut budaya anutan yang amat kuat. Artinya, perilaku berbahasa tokoh yang dianggap sebagai anutan juga akan diikutinya, lepas dari bahasa yang mereka gunakan itu salah atau benar secara tatabahasa. Jika ternyata perilaku itu menyimpang, budaya anutan ini yang kemudian mengekalkan kesalahan berbahasa. Dalam banyak hal, kaidah-kaidah berbahasa kemudian dikesampingkan. Hal yang juga tidak dapat dielakkan adalah kenyataan bahwa masyarakat Indonesia masih memandang bahwa sesuatu yang datang dari Barat dianggap lebih tinggi nilainya daripada yang datang dari tanah air. Efek globalisasi yang akhirnya memunculkan westernisasi sekarang ini sangat terlihat dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Tanpa kita sadari pola tersebut mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Kemahiran berbahasa asing, kepatuhan akan kaidah-kaidah bahasa asing dianggap lebih diutamakan daripada kemahiran berbahasa Indonesia, apalagi bahasa daerah. Apalagi di balik itu semua, kemahiran berbahasa asing memang mengisyaratkan nilai ekonomi yang lebih unggul dibanding kemahiran berbahasa Indonesia atau bahasa daerah.

## **02. Budaya Literasi Masyarakat yang Tinggi**

Dengan bahasa, manusia menyimpan nilai-nilai budaya, bahkan yang berasal dari masa lalu yang jauh, nilai yang telah teruji dalam perjalanan waktu, baik yang bersifat umum maupun yang khas berupa pandangan hidup. Kesemuanya itu dimungkinkan oleh simbol-simbol dalam bahasa yang merumuskan makna menjadi tertentu dan memelihara makna itu bagi penggunaannya di masa yang kemudian.

Tersusunlah perbendaharaan makna yang menjadi keperluan bagi terselenggaranya kehidupan intelektual. Dengan bahasa itu manusia merekonstruksi pengalaman yang sedang dijalani dalam suatu susunan yang terpahami. Simbol-simbol dalam bahasa itu bukan saja menyajikan makna yang dialami oleh perseorangan, melainkan juga menyajikan susunan makna yang terdapat dalam hubungan seseorang dengan lainnya dalam suatu masyarakat sehingga terjilmaah suatu kesatuan nilai yang kompleks, misalnya nilai-nilai yang berkaitan dengan dunia fisik, kehidupan masyarakat, moral, estetika, dan kehidupan religius. Dengan bahasa itu pula manusia menyongsong masa depannya dengan membuat perencanaan dalam mengubah dirinya dan lingkungannya. Ini dimungkinkan dengan penggunaan makna dalam tautan baru atau situasi baru sehingga terjadi transfer dan aplikasi makna bagi kepentingan pembuatan pertimbangan dan kesimpulan. Apa yang dimiliki pada masa sekarang dan masa lalu dapat digunakan untuk mempertimbangkan dan menyimpulkan sesuatu yang baru dan yang belum diketahui. Sebagai makhluk sosial manusia melibatkan bahasa saat berinteraksi dengan sesamanya. Melalui bahasa kita dapat mengetahui budaya dan pola pikir suatu masyarakat. Karakter seseorang tampak dari perilaku berbahasanya. Hal penting dalam pembentukan karakter bangsa adalah menumbuhkembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mendongeng adalah salah satu kebiasaan baik yang merupakan tradisi pengajaran tertua dalam dunia pendidikan. Dongeng pula yang menjadi sebab tumbuhnya bahasa dalam evolusi peradaban manusia. Untuk itu menggunakan dongeng sebagai media pembelajaran dapat membangun pendidikan karakter.

### **03. Penguatan Praktik Diplomasi Kebahasaan yang Maju**

Penggunaan bahasa internasional pada forum-forum internasional menjaditanda bahwa bahasa juga digunakan sebagai alat diplomasi. Potensi kebahasaan di Indonesia merupakan sumber daya yang sangat besar untuk dijadikan sebagai salah satu bentuk diplomasi (*soft diplomacy*) baik di dalam maupun di luar negeri. Ke-binekatunggalika-an bahasa di Indonesia dapat dijadikan contoh bahwa melalui bahasa sebuah bangsa dapat bersatu.

#### 04. Pelindungan Bahasa dan Sastra yang Dinamis Berdasarkan Politik

##### Perencanaan Bahasa

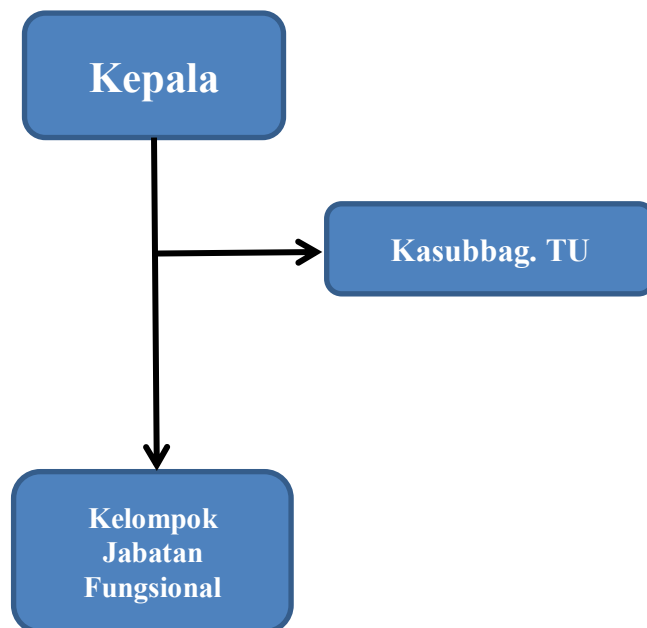
Kebanggaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam masyarakat akan mendukung citra bangsa, karena bahasa memiliki fungsi antara lain: (1) bahasa sebagai simbol budaya dan nilai kebangsaan, (2) bahasa sebagai simbol artikulasi negara dan bangsa (3) bahasa sebagai sarana eksplorasi etika dan estetika bangsa (4) bahasa sebagai eksplorasi keindahan alam dan geografis bangsa, (5) bahasa sebagai bentuk kecintaan hubungan antar suku bangsa.

##### 1.4. Kondisi Umum

Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu unit pelaksan teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Struktur organisasi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan,

pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian bahasa dan sastra;
- b. pemetaan bahasa dan sastra;
- c. pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia;
- d. fasilitas pelaksanaan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra;
- e. pemberian layanan informasi kebahasaan dan kesastraan;
- f. pelaksanaan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan; dan
- g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Kedudukan, tugas, dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2012, Bab II, adalah sebagai berikut.

(1) Pasal 5, Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan; (2) Pasal 6, ayat 2, kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan kegiatannya; ayat 5, Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) Pasal 9, Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan berkoordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, dan Perguruan Tinggi. Secara prinsip sebenarnya tugas balai adalah pelaksanaan tugas teknis pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa serta sastra di daerah.

## **1.5 Potensi dan Permasalahan**

### **1.4.1 Analisis Lingkungan Strategis**

Kondisi lingkungan strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus. Berikut ini ringkasan mengenai beberapa aspek lingkungan strategis yang termaktub dalam renstra Kemendikbud.

#### **1. Kondisi Bahasa, Sastra di Sumatera Selatan**

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai menghargai keragaman, berakhlak mulia, bermoral, beretika dan bergotongroyong. Nilai-nilai itu hidup

dalam keseharian baik personal maupun komunal untuk membentuk jati diri bangsa dengan bahasa sebagai unsur terdekat pada diri setiap orang.

Peran bahasa dan sastra dan budaya sebagai media dalam membangun karakter bangsa dihadapkan pada persimpangan yang sangat kompleks dalam menghadapi era keterbukaan informasi dan media. Keterbukaan informasi yang tidak disikapi secara bijaksana dan tidak terkendali akan menggerus penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagaimana terlihat di ruang publik. Sementara itu beberapa lingkungan strategis kebahasaan lainnya yang perlu dieksplorasi lebih.

Gambar 1.13 Skema Penguatan Pendidikan Karakter



Sumber: [https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/?page\\_id=132](https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/?page_id=132)

Dalam skema Penguatan Pendidikan Karakter tersebut, bahasa dan sastra menjadi komponen utama dalam meningkatkan “Gemar Membaca”. Sementara itu, kondisi kegemaran membaca di Sumatera Selatan tergambar dalam tabel berikut.

Provinsi	Buku Cerita			Provinsi	Pelajaran Sekolah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Aceh	14.65	13.38	13.79	Sumatera Utara	28.64	30.94	29.69
Kepulauan Riau	13.11	10.32	12.79	Kepulauan Riau	29.77	28.70	29.65
Sumatera Utara	11.27	10.99	11.14	Aceh	29.84	28.70	29.07
Riau	9.58	11.42	10.68	Bengkulu	33.23	25.16	27.82
Jambi	9.74	9.95	9.88	<b>Sumatera Selatan</b>	<b>26.01</b>	<b>24.82</b>	<b>25.26</b>
Sumatera Barat	10.28	9.19	9.70	Sumatera Barat	26.35	23.85	25.02
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>5.38</b>	<b>11.61</b>	<b>9.29</b>	Riau	25.00	23.98	24.39
Bengkulu	11.62	7.89	9.12	Jambi	23.76	23.15	23.35

Kepulauan Bangka Belitung	9.23	8.30	8.81	Lampung	24.20	21.72	22.47
Lampung	7.34	8.87	8.40	Kepulauan Bangka Belitung	21.28	20.35	20.86

Proporsi Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Membaca (Baik Cetak Maupun Elektronik) Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi, Jenis Bacaan, dan Tipe Daerah, 2018, Sumber diolah dari data Badan Pusat Statistik

Kedua tabel tersebut menggambarkan bahwa dalam hal membaca “Buku Cerita”, penduduk usia 5 tahun ke atas Sumatera Selatan menempati urutan ke 7 dibandingkan dengan provinsi lain di pulau sumatera. Berikutnya dalam hal membaca “Pelajaran Sekolah” Sumatera Selatan berada pada urutan ke 5 dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau sumatera.

Di antara sumber-sumber penyusunan bahan bacaan yang dapat dieksplorasi lebih jauh adalah manuskrip. Berdasarkan data yang berhasil diperoleh melalui inventarisasi data internal Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan jumlah manuskrip yang tercatat adalah sebanyak 720 data, dengan perincian sebagai berikut.

#### Data Manuskrip Sumatera Selatan

Sudah diteliti	30
Belum diteliti	120
Tanpa keterangan	570
Jumlah	720

## 2. Kondisi Bahasa dan Desentralisasi Pemerintahan

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 diamanatkan bahwa Bahasa dan sastra termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkruen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kewenangan penanganan bahasa dan sastra dapat dicermati dalam tabel berikut.

Tabel 1.2  
Pembagian Kewenangan Penanganan Bahasa dan Sastra



Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Daerah Provinsi	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia	pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota

Meskipun pembagian kewenangan urusan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah dengan jelas diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah tetap berada dalam koordinasi pemerintah pusat yang diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2009. Kewenangan daerah telah diatur dalam Perda Provinsi dan/atau kab./KOTA.

#### 1.4.2 Permasalahan dan Tantangan Pengembangan dan Pembinaan

##### Bahasa 2020—2024

##### A. Permasalahan

Dalam Renstra Kemendikbud telah diuraikan permasalahan yang terkait dengan bidang kebahasaan, antara lain:

1. rendahnya kemahiran membaca (*reading skill*) dalam pengukuran PISA OECD tahun 2018;
2. rendahnya nilai UN bahasa Indonesia. Data capaian nilai UN Bahasa Indonesia di Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Sumber: Laman Pusat Penilaian Pendidikan, Kemdikbud);

CAPAIAN NILAI UJIAN NASIONAL  
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO	NAMA PROVINSI	JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH PESERTA	RERATA NILAI PADA MATA UJI				RERATA NILAI
				BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS	MATEMATIKA	IPA	
1	DKI JAKARTA	1320	136740	<b>72.88</b>	60.98	53.26	55.71	60,71
2	JAWA BARAT	8119	769388	<b>64.24</b>	50.64	46.14	47.74	52,19
3	JAWA TENGAH	4993	524334	<b>70.85</b>	50.83	49.28	52.54	55,88
4	DI YOGYAKARTA	546	51260	<b>78.15</b>	58.73	60.22	61.16	64,57
5	JAWA TIMUR	8166	586606	<b>67.25</b>	51.15	48.03	50.89	54,33
6	ACEH	1521	85691	<b>54.57</b>	43.12	38.79	40.95	44,36
7	SUMATERA UTARA	3512	279314	<b>59.17</b>	47.12	43.6	44.87	48,69
8	SUMATERA BARAT	1199	95731	<b>68.83</b>	47.85	46.76	49.31	53,19
9	RIAU	1753	112952	<b>65.16</b>	48.45	46.06	47.67	51,84

10	JAMBI	1034	58767	<b>60.12</b>	45.14	41.26	43.45	47,49
11	SUMATERA SELATAN	1753	138531	<b>58.12</b>	43.86	40.34	41.85	46,04
12	LAMPUNG	2006	133102	<b>62</b>	44.39	40.03	42.88	47,33

Rendahnya kemahiran berbahasa Indonesia, data skor UKBI rata2 Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut. (Sumber: Data UKBI, BBSS)

NO.	Rata-rata Skor	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Istimewa	2				
2.	Sangat Unggul	32	30	22	22	15
3.	Unggul	250	220	310	130	137
4.	Madya	300	130	148	52	41
5.	Semenjana	75	75	75	6	6
6.	Marginal	20	22	15	5	5

4. rendahnya jumlah penutur muda bahasa daerah. (Renstra Kemdikbud, 2015:23—24). Sementara itu, beberapa permasalahan di bidang kebahasaan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah sebagai berikut.

1. Belum meratanya dukungan bahasa daerah ke dalam lima bahasa Indonesia.
2. Belum terstandarnya kemahiran berbahasa Indonesia pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kebahasaan.
4. Terbatasnya keterlibatan publik dalam penanganan kebahasaan.
5. Belum memadainya sarana dan prasarana layanan kebahasaan di daerah.

## B. Tantangan

Beberapa hal yang diuraikan di atas dapat dinyatakan dalam perspektif tantangan yang harus diatasi. Berikut ini beberapa langkah atau upaya yang akan atau seharusnya dilaksanakan.

- a. Memperkuat ekosistem pendidikan dengan wujud sebagai berikut.
  1. Menciptakan suasana sekolah yang mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;
  2. Meningkatkan kompetensi dan kemahiran guru dalam berbahasa Indonesia;
  3. Mendorong orang tua agar terlibat aktif dalam pembelajaran berbahasa Indonesia;
  4. Menumbuhkembangkan masyarakat yang peduli dengan bahasa Indonesia;
  5. Melibatkan dunia industri untuk mengutamakan berbahasa Indonesia;

6. Mendukung peran organisasi profesi peduli penggunaan berbahasa Indonesia; dan
7. Mengoptimalkan peran pemerintah dalam pemertabatan bahasa Indonesia.

**b. Pengembangan yang seimbang dan harmoni antara bahasa nasional dan bahasa daerah.**

Tantangannya adalah bagaimana mengembangkan budaya baca dan perluasan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu secara konsisten sebagai bahasa resmi dalam pendidikan dan pengelolaan pemerintahan, seiring dengan semangat menjaga dan melindungi kekayaan bahasa dan sastra daerah.

**c. Penguatan karakter dan jati diri bangsa**

Tantangannya adalah bagaimana pemahaman terhadap nilai-nilai luhur bahasa dan sastra menjadi landasan untuk memperkuat kehidupan yang harmonis. Bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bahasa, adat, tradisi, nilai sejarah dan kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif. Relevan dengan semua ini adalah apa yang disebut revolusi mental sebagai bentuk strategi kebudayaan. Kebudayaan Indonesia harus dikembangkan guna meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan pula untuk meningkatkan pendidikan kewargaan dan pendidikan karakter siswa, adalah bagaimana mengoptimalkan pendidikan agama, kewargaan dan karakter sebagai wadah pembentukan karakter bangsa di sekolah; memberdayakan masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum; melakukan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; meningkatkan penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan berbagai media komunikasi dan informasi.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

#### **BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

##### **2.1. Visi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan**

Dengan mengacu pada Visi yang dinyatakan dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024 yang berbunyi *Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong*; dan dengan mengacu pula pada tugas dan fungsi Balai Bahasa, prinsip dasar pembangunan kebahasaan dan kesastraan, kondisi umum, dan potensi serta permasalahan seperti yang telah dijelaskan di bagian awal, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan menetapkan visi 2020—2024 sebagai berikut.

**Terwujudnya ekosistem pengembangan dan pembinaan bahasa yang mendukung budaya riset dan inovasi kebahasaan yang kreatif, budaya literasi masyarakat yang tinggi, penguatan praktek diplomasi kebahasaan yang maju, dan perlindungan bahasa dan sastra yang dinamis berdasarkan politik dan perencanaan bahasa baru**

##### **2.2. Misi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan memiliki misi:

1. Mewujudkan ekosistem pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra yang mendukung budaya riset dan inovasi kebahasaan yang kreatif.
2. Mewujudkan praktek-praktek pendidikan literasi di masyarakat untuk meningkatkan budaya literasi yang tinggi yang ditopang oleh teknologi digital.
3. Mewujudkan penguatan diplomasi kebahasaan yang maju.
4. Mewujudkan perlindungan bahasa dan sastra yang dinamis berbasis kekuatan masyarakat.

##### **2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan**

Tujuan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang berkaitan dengan penanganan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020—2024. Tujuan itu *Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan*.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan serta untuk mendukung

pencapaian tujuan strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai. Tujuan strategis diambil dari sasaran program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:

T-1 Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia (SP 6.5)

T-2 Meningkatnya daya hidup bahasa daerah (SP 6.7)

Tujuan strategis yang telah ditetapkan dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan sebagai ukuran kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode renstra (2024). Indikator kinerja tujuan yang ditetapkan merupakan indikator kinerja program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:

1. Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji (IKP 6.5.1)
2. Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik (IKP 6.5.2)
3. Indeks daya hidup bahasa daerah (IKP 6.7.1)

Target keberhasilan tujuan strategis berdasarkan indikator tujuan selama periode renstra 2020 – 2024 ditetapkan sebagai berikut.

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024
Meningkatnya Kemahiran Penutur bahasa Indonesia	Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji	%	60
	Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik	%	75
Meningkatnya daya Hidup Bahasa Daerah	Indeks daya hidup bahasa daerah	<i>Indeks</i>	0.65

## 2.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran yang ditetapkan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan merupakan sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam renstra Kemneterian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun sasaran kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

S.1 Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia

S.2 Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia

S.3 Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

S.4 Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina

S.5 Terlindunginya bahasa dan Sastra daerah yang kritis dan terancam

S.6 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mengukur tingkat capaian sasaran tersebut, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 9 (sembilan) indikator kinerja yang merupakan bagian dari indikator kinerja kegiatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu:

1. Jumlah Kosa Kata Bahasa Indonesia
2. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian
3. Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina
4. Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra
5. Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah
6. Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah
7. Jumlah Produk Kesastraan Berkembangkan
8. Predikat SAKIP Satker minimal BB
9. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91

Berikut rincian keterkaitan antara enam sasaran kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia	1. Jumlah Kosa Kata Bahasa Indonesia
2.	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian
3.	Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	1. Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina
4.	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	1. Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra
5.	Terlindunginya bahasa dan Sastra daerah yang kritis dan terancam	1. Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah
		2. Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah
		3. Jumlah Produk Kesastraan Berkembangkan

6.	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	1. Predikat SAKIP Satker minimal BB
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 92

## 2.5. Tata Nilai Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan

Nilai-nilai organisasi merupakan salah satu acuan yang diyakini dan dihayati serta diamalkan oleh seluruh pegawai Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Nilai-nilai tersebut mendorong berkembangnya semangat untuk memberikan yang terbaik bagi lembaga. Di antara nilai-nilai tersebut ialah:

### a. *Memiliki Integritas*

Integritas berarti keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Indikator positifnya yaitu konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran; jujur dalam segala tindakan; menghindari benturan kepentingan; berpikir positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi; dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, indikator negatif yang harus dihindari ialah melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan; melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi; menerima pemberian (gratifikasi) dan bentuk apa pun di luar ketentuan.

### b. Kreatif dan inovatif

Kreatif dan inovatif berarti memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Indikator positifnya yaitu memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan serta mampu menghasilkan karya baru; selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan; bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif; berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah; memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien. Sementara itu, indikator negatifnya ialah merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai; bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan; dan monoton.

### c. *Inisiatif*

Memiliki inisiatif berarti bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. indikator positifnya yaitu responsif; bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi; memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu

mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah. Sementara itu, indikator negatifnya ialah mengerjakan tugas terbatas pada yang diminta oleh atasan dan berlindung dari kegagalan.

*d. Pembelajar*

Pribadi pembelajar selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi profesionalnya. Indikator positifnya yaitu berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman; mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kesalahan; berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja. Sementara itu, indikator negatifnya yaitu tidak memanfaatkan waktu dengan baik; enggan mempelajari hal yang baru; malas bekerja/bertanya/berdikusi.

*e. Menjunjung Meritokrasi*

Menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang berkompeten. Indikator positifnya ialah berkompetisi secara profesional; memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai; memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja; tidak sewenang-wenang; tidak mementingkan diri sendiri. Sementara itu, indikator negatifnya yaitu menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya; mendapatkan promosi hanya karena kedekatan/primordialisme.

*f. Terlibat Aktif*

Terlibat aktif berarti senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Indikator positifnya yaitu terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung lembaga; memberikan dukungan kepada rekan kerja. Sementara itu, indikator negatifnya yaitu tidak peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar dan bersifat pasif (menunggu perintah).

*g. Tanpa Pamrih*

Tanpa pamrih berarti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Indikator positifnya yaitu penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan; rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya; menunjukkan senyum, sapa, sopan, dan santun (4S). Sementara itu, indikator negatifnya yaitu melakukan pekerjaan dengan terpaksa dan berburuk sangka terhadap rekan kerja.



## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan**

Kebijakan dan strategi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada arah kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis yang mendukung penguatan budaya, bahasa dan pendidikan karakter. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi berikut ini.

1. Penguatan ekosistem dan tata kelola pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk menciptakan budaya riset kebahasaan yang inovatif.
2. Peningkatan kualitas praktek pendidikan literasi di masyarakat dengan dukungan teknologi digital untuk penguatan peran masyarakat dan para pemangku kepentingan.
3. Penguatan strategi dan diplomasi kebahasaan untuk peningkatan nilai ekonomi bahasa dan sastra di daerah.
4. Penguatan dan perluasan layanan profesional kebahasaan sebagai wujud pembinaan bahasa dan sastra di daerah.

Bahasa Sumatera selatan sebagai UPT Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas, strategi yang dilaksanakan dengan 1) peningkatan budaya literasi; 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; 3) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi melalui berbagai aktivitas, dan 4) perluasan layanan profesional kebahasaan. Kedua bidang pendidikan dan kebudayaan itu dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan agenda pembangunan 2020—2024. Program dan kegiatan yang terkait dengan dukungan tersebut dapat dilihat pada sasaran program dan kegiatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

#### **3.2 Kerangka Regulasi**

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Bahasa Sumatera Selatan sebagai UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa membutuhkan kerangka regulasi sebagai landasan hukum formal. Daftar regulasi dan urgensi pembentukannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

NO.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan
1.	Permendikbud tentang Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa Indonesia	Pelaksanaan Perpres Nomor 63 Tahun 2019, tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
2.	Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah	1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 48 Tahun 2018 2. Penguatan kebijakan Balai Bahasa dalam Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
3.	Peraturan Daerah tentang Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia di Daerah	Pelaksanaan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2009, dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019 2. Penguatan kebijakan Balai Bahasa dalam Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa Indonesia di Daerah
4.	Peraturan Kepala Badan	Acuan pelaksanaan pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra di daerah, Prosedur Operasional Standar

### 3.3. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka menjamin keterlaksanaan program Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan diperlukan kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan itu mencakupi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain, untuk:

- 1) meningkatkan koordinasi pelaksanaan program-program sesuai dengan fungsi dan visi/misi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) membangun struktur organisasi yang tepat fungsi untuk menghindari ketumpangtindihan fungsi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program; dan
- 3) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme SDM.

Berikut ini tabel penanggung jawab program dan kegiatan Balai Bahasa Sumatera Selatan.

<b>NO.</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
1.	Kegiatan Pengembangan	Kepala Balai
	Pengkajian	
	Pembakuan dan Kodifikasi	
	Informasi dan Publikasi	
2.	Kegiatan Pembinaan	Kepala Balai
	Pemasyarakatan	
	Pembelajaran	
	Peningkatan dan pengendalian	
3.	Kegiatan Ketatausahaan	Kasubbag. Tata Usaha
	Perencanaan	
	Kepegawaian	
	Keuangan	
	Tatalaksana	
	Kerumahtanggaan	

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1 Target Kinerja**

Sesuai dengan Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan bidang kebahasaan dan kesastraan serta berdasarkan beberapa pernyataan pada bab-bab sebelumnya, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan menargetkan kinerja program 2020—2024 sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Target Kinerja**

Kode	SK/IKK	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
SK 1	Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia							
IKK 1.1	Jumlah Kosa Kata Bahasa Indonesia	Kosakata	1000	1000	1100	1100	1100	1100
SK 2	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia							
IKK 2.1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan melalui penelitian	Dokumen	2	20	10	10	10	10
SK 3	Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik							
IKK 3.1	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	Lembaga	105	140	150	100	50	50
SK 4	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina							
IKK 4.1	Jumlah Tenaga Profesional dan Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	Orang	1380	720	2000	2000	2000	2000
SK.5	Terlindunginya bahasa dan Sastra daerah yang kritis dan terancam							
IKK 5.1	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah.	Orang	0	100	200	300	350	250
IKK 5.2	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah.	Orang	130	400	500	500	450	300
IKK 5.2	Jumlah Produk Kesastraan Berkembangkan	Sastra	0	0	2	2	2	2
SK 6	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa							
IKK 6.1	Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	B	BB	BB	B	A	A
IKK 6.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	Nilai	91	92	92	93	94	94

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun dengan memerhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan pendidikan, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Anggaran Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan bersumber dari APBN. Perkiraan kebutuhan anggaran Balai Bahasa tampak pada tabel berikut.

Tabel 4.2  
Perkiraan Kebutuhan Anggaran Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan  
Barat 2020—2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Pendanaan (ribuan)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya daya ungkap Bahasa Indonesia	1. Jumlah Kosa Kata Bahasa Indonesia	201.478	250.000	250.000	250.000	250.000
2.	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan Melalui Penelitian	772.953	950.000	950.000	950.000	960.000
3.	Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	1. Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	494.186	320.000	270.000	150.000	150.000
4.	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	1. Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	1.182.620	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5.	Terlindunginya bahasa dan Sastra daerah yang kritis dan terancam	1. Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah	0	350.000	400.000	450.000	300.000

		Kritis dan Terancam Puhah					
		2. Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Puhah	394.920	500.000	500.00	400.000	395.000
		3. Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan	0	122.000	155.000	132.000	130.000
6.	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat SAKIP Satker minimal BB	275.000	275.000	485.000	550.000	590.000
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	4.210.730	4.350.000	4.350.000	5.560.000	6.270.000

### 4.3. Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam sistem ini tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan, yaitu:

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut merupakan satu kesatuan fungsi manajemen yang saling berkait dan saling melengkapi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006, pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan; pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin; dan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (Output), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan oleh institusi terkait, antara lain Bappenas, DJA Kemenkeu, Itjen Kemdikbud, Biro Keuangan Kemdikbud, Biro PKLN Kemdikbud, BPKP, dan BPK. Pemantauan dan pelaporan dilakukan setiap minggu melalui MoLKKemdikbud.go.id, setiap bulan melalui E-Monev DJA, setiap triwulan melalui E-Bappenas, dan setiap tahun melalui LAKIP.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020— 2024 disusun berdasarkan pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020—2024, Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Penyusunan Renstra dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya (1) mengkaji dokumen yang relevan dengan upaya pengembangan (pengkajian) dan pembinaan (pemsyarakatan) bahasa dan sastra khususnya di Sumatera Selatan, dan pendidikan umumnya; (2) interaksi dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengkajian dan pemsyarakatan bahasa dan sastra baik di pusat maupun daerah; (3) menganalisis capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan; dan (4) penyusunan renstra. Terakhir, Renstra ini menjadi acuan bagi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.



Lampiran I : Matrik Kinerja dan Pendanaan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline	Target					Alokasi Anggaran (Juta rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK1	Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia													
IKK 1.1	Jumlah Kosa Kata Bahasa Indonesia	Kosakata	1000	1000	1100	1100	1100	1000	201.478	201.478.000	201.478.000	201.478.000	201.478.000	201.478.000
SK 2	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia													
IKK 2.1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	Dokumen	2	20	10	10	10	10	494.186	320.000	270.000	150.000	150.000	
SK 3	Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik													
IKK 3.1	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	Lembaga	105	140	150	100	50	50	772.953	950.000	950.000	950.000	960.000	
SK 4	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina													
IKK 4.1	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	Orang	1380	720	2000	2000	2000	2000	1.182.620	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
SK 5	Terlindunginya bahasa dan Sastra daerah yang kritis dan terancam													
IKK 5.1	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang	0	100	200	300	350	250	0	350.000	400.000	450.000	300.000	
IKK 5.2	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	Orang	130	400	500	500	450	300	394.920	500.000	500.000	400.000	395.000	
IKK 5.3	Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan	Sastra	0	0	2	2	2	2	0	122.000	155.000	132.000	130.000	
SK 6	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa													
IKK 6.1	Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	B	BB	BB	B	A	A	275.000	275.000	485.000	550.000	590.000	
IKK 6.1	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	Nilai	91	92	92	93	94	94	4.210.730	4.350.000	4.350.000	5.560.000	6.270.000	

Lampiran II : Matrik Definisi Operasional dan Metode Perhitungan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
SK1	Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia			
IKK 1.1	Jumlah Kosa Kata Bahasa Indonesia	Jumlah kosakata bahasa daerah beserta maknanya dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia yang dihimpun dan diusulkan sebagai bahan pengayaan KBBI	<p>Capaian dihitung secara akumulasi setiap tahun, mulai dari angka dasar sampai dengan tahun berkenaan perhitungan renstra</p> $\text{Capaian } T_n = \text{Akumulasi } T-1 + \text{Capaian } T_0$ <p>Capaian <math>T_n</math> adalah jumlah capaian pada tahun berkenaan dengan perhitungan renstra</p> <p>Akumulasi <math>T-1</math> adalah akumulasi capaian mulai dari angka dasar sampai dengan tahun sebelum tahun berkenaan dengan perhitungan renstra (angka dasar diperoleh dari akumulasi capaian renstra periode sebelumnya)</p> <p>Capaian <math>T_0</math> adalah jumlah capaian pada tahun berkenaan dengan perhitungan renstra</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lakip Balai Bahasa Sumsel.</li> <li>Laporan Hasil Pengayaan Kosakata</li> </ol>
SK 2	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia			
IKK 2.1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	Hasil dari penelitian bahasa dan sastra yang dibuat Dalam bentuk rekomendasi kepada pimpinan dan pihak terkait sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.	<p>Capaian dihitung secara akumulasi setiap tahun, mulai dari angka dasar sampai dengan tahun berkenaan perhitungan renstra</p> $\text{Capaian } T_n = \text{Akumulasi } T-1 + \text{Capaian } T_0$ <p>Capaian <math>T_n</math> adalah jumlah capaian pada tahun berkenaan dengan perhitungan renstra</p> <p>Akumulasi <math>T-1</math> adalah akumulasi capaian mulai dari angka dasar sampai dengan tahun sebelum tahun berkenaan dengan perhitungan renstra (angka dasar diperoleh dari akumulasi capaian renstra periode sebelumnya)</p> <p>Capaian <math>T_0</math> adalah jumlah capaian pada tahun berkenaan dengan perhitungan renstra</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lakip Balai Bahasa Sumsel.</li> <li>Laporan hasil penelitian/kajian bahasa dan sastra</li> </ol>

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
SK 3	Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik			
IKK 3.1	Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia  Terbina	Jumlah lembaga pemerintah dan swasta yang diintervensi dalam hal penggunaan Bahasa Indonesia, dalam ruang publik seperti penulisan papan nama, petunjuk, dan sebagainya.	Capaian dihitung secara akumulasi setiap tahun, mulai dari angka dasar sampai dengan tahun berkenaan perhitungan renstra  $\text{Capaian } T_n = \text{Akumulasi } T-1 + \text{Capaian } T_0$ Capaian $T_n$ adalah jumlah capaian pada tahun berkenaan dengan perhitungan renstra  Akumulasi $T-1$ adalah akumulasi capaian mulai dari angka dasar sampai dengan tahun sebelum tahun berkenaan dengan perhitungan renstra (angka dasar diperoleh dari akumulasi capaian renstra periode sebelumnya)  Capaian $T_0$ adalah jumlah capaian pada tahun berkenaan dengan perhitungan renstra	1. Lakip Balai Bahasa Sumsel.  2. Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan bahasa terhadap lembaga
SK 4	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina			
IKK 4.1	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	Jumlah tenaga ahli khusus dan calon tenaga ahli yang dibina mutu penggunaan bahasa dan sastranya melalui pembelajaran dan pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.	Capaian dihitung secara akumulasi setiap tahun, mulai dari angka dasar sampai dengan tahun berkenaan perhitungan renstra  $\text{Capaian } T_n = \text{Akumulasi } T-1 + \text{Capaian } T_0$ Capaian $T_n$ adalah jumlah capaian pada tahun berkenaan dengan perhitungan renstra  Akumulasi $T-1$ adalah akumulasi capaian mulai dari angka dasar sampai dengan tahun sebelum tahun berkenaan dengan perhitungan renstra (angka dasar diperoleh dari akumulasi capaian renstra periode sebelumnya)  Capaian $T_0$ adalah jumlah capaian pada tahun berkenaan dengan perhitungan renstra	1. Lakip Balai Bahasa Sumsel.  2. Laporan hasil kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra
SK 5	Terlindunginya bahasa dan Sastra daerah yang kritis dan terancam			
IKK 5.1	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah adalah jumlah penutur bahasa daerah dari kalangan generasi muda antara usia 10--25 tahun yang terlibat/mendukung kegiatan pelindungan bahasa atau telah mengikuti kegiatan revitalisasi bahasa di suatu daerah persebaran bahasa daerah yang status bahasanya kritis dan terancam punah. Revitalisasi bahasa merupakan upaya pelindungan bahasa melalui pewarisan atau	Capaian dihitung secara akumulasi setiap tahun, mulai dari angka dasar sampai dengan tahun berkenaan perhitungan renstra  $\text{Capaian } T_n = \text{Akumulasi } T-1 + \text{Capaian } T_0$ Capaian $T_n$ adalah jumlah capaian pada tahun berkenaan dengan perhitungan renstra	1. Lakip Balai Bahasa Sumsel.  2. Lapaoran hasil pemetaan, kajian vitalitas, dan konservasi bahasa daerah  3. Laporan hasil revitalisasi bahasa daerah

		pembelajaran bahasa daerah tersebut di kalangan penutur muda.	Akumulasi T-1 adalah akumulasi capaian mulai dari angka dasar sampai dengan tahun sebelum tahun berkenaan dengan perhitungan renstra (angka dasar diperoleh dari akumulasi capaian renstra periode sebelumnya)  Capaian T0 adalah jumlah capaian pada tahun berkenaan dengan perhitungan renstra	
--	--	---	--	--

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
IKK 5.2	Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritis dan terancam punah adalah jumlah penutur/pendukung/pelaku muda sastra berbahasa daerah dari kalangan generasi muda antara usia 10--19 tahun yang telah mengikuti kegiatan revitalisasi sastra (khusus sastra lisan) di suatu daerah persebaran bahasa daerah yang status sastranya kritis dan terancam punah. Revitalisasi sastra merupakan upaya pelindungan sastra melalui pewarisan atau pembelajaran sastra daerah tersebut di kalangan generasi muda.	Capaian dihitung secara akumulasi setiap tahun, mulai dari angka dasar sampai dengan tahun berkenaan perhitungan renstra  $\text{Capaian Tn} = \text{Akumulasi T-1} + \text{Capaian T0}$ Capaian Tn adalah jumlah capaian pada tahun berkenaan dengan perhitungan renstra  Akumulasi T-1 adalah akumulasi capaian mulai dari angka dasar sampai dengan tahun sebelum tahun berkenaan dengan perhitungan renstra (angka dasar diperoleh dari	1. Lakip Balai Bahasa Sumsel.. 2. Lapaoran hasil pemetaan, kajian vitalitas, dan konservasi sastra daerah 3. Laporan hasil revitalisasi sastra daerah
IKK 5.3	Jumlah Produk Kesastraan Berkembang	Penelusuran karya sastra sebagai kekayaan budaya melalui penelitian untuk mengetahui jumlah dan mutu karya sastra Indonesia dalam bentuk hasil seperti bahan ajar, terjemahan, dan pengembangan.	Capaian dihitung secara akumulasi setiap tahun, mulai dari angka dasar sampai dengan tahun berkenaan perhitungan renstra  $\text{Capaian Tn} = \text{Akumulasi T-1} + \text{Capaian T0}$ Capaian Tn adalah jumlah capaian pada tahun berkenaan dengan perhitungan renstra  Akumulasi T-1 adalah akumulasi capaian mulai dari angka dasar sampai dengan tahun sebelum tahun berkenaan dengan perhitungan renstra (angka dasar diperoleh dari akumulasi capaian renstra periode sebelumnya)  Capaian T0 adalah jumlah capaian pada tahun berkenaan dengan perhitungan renstra	1. Lakip Balai Bahasa Sumsel.. 2. Laporan hasil kegiatan pengembangan sastra
SK 6	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa			
IKK 6.1	Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat SAKIP satker minimal BB adalah hasil penilaian SAKIP Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai minimal < 70 -- 80 dengan itpretasi Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik.	Nilai Sakip merupakan akumulasi dari hasil penilaian beberapa komponen  $\text{Nilai Sakip} = \text{Perencanaan Kinerja (25\%)} + \text{Pengukuran Kinerja (25\%)} + \text{Pelaporan Kinerja (15\%)} + \text{Evaluasi Kinerja (10\%)} + \text{Capaian Kinerja (20\%)}$	Laporan hasil evaluasi (LHE) Sakip oleh Biro Perencanaan dan Inpektorat Jenderal

			<p>ategori Penilaian SAKIP</p> <p>Kategori:</p> <p>Nilai: &gt;90 -- 100; AA; Interpretasi: Sangat Memuaskan</p> <p>Nilai: &gt;80 -- 90; Kategori: A ; Interpretasi: Memuaskan</p> <p>Nilai: &gt;70 -- 80; Kategori: BB; Interpretasi: Sangat Baik</p> <p>Nilai: &gt;60 -- 70; Kategori: B ; Interpretasi: Baik</p> <p>Nilai: &gt;50 -- 60; Kategori: CC; Interpretasi: Cukup</p> <p>Nilai: &gt;40 -- 50; Kategori: C ; Interpretasi: Kurang</p> <p>Nilai: &gt;30 -- 40; Kategori: D ; Interpretasi: Sangat Kurang</p>
--	--	--	---

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Metode Perhitungan	Sumber Data	Sumber Data
IKK 6.1	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91 adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh Kantor Bahasa Prov. Sultra atas penilaian kinerja yang berasal dari Komponen Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	<p>Kinerja Anggaran = EKA (60%) + IKPA (40%)</p> <p>EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) aspek penilaian kinerja yang berasal dari indikator penyerapan anggaran, konsistensi, capaian output, dan efisiensi.</p> <p>IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) adalah aspek penilaian kinerja yang berasal dari indikator revisi DIPA, deviasi halaman III, pagu minus, penyampaian data kontrak, pengelolaan UP dan TUP, penyampaian LPJ, dispensasi SPM, penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, capaian output, retur SP2D, kesalahan SPM, dan renkas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aplikasi Smart DJA</li> <li>Aplikasi Simproka (Spasikita)</li> </ol>

